

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap media atau pers mempunyai berbagai macam fungsi yang tertuang dalam fungsi pers. Namun, hal tersebut berbenturan dengan banyaknya kepentingan yang menunggangi media pada saat ini. Kepentingan tersebut dapat kita lihat dengan analisis secara detail pada media yang kita konsumsi. Apakah media tersebut membela kepentingan pemerintah, pemilik modal, atau masyarakat.

Sebuah berita yang dihasilkan media merupakan suatu bentuk komunikasi massa, berita tersebutlah yang dikonsumsi oleh khalayak dan dapat mempengaruhi persepsi dan pola pikir khalayak terhadap suatu hal. Pikiran seseorang secara sadar atau tidak akan terprogram sesuai dengan apa yang dilihat, dibaca, dan apa yang didengar, terkecuali apabila seseorang bisa menginterpretasi informasi tersebut secara maksimal dan tidak langsung menerima informasi secara mentah. Interpretasi yang baik terhadap informasi akan membuat *audience* mampu mencerna pesan dengan baik. Media juga mempunyai andil yang sangat besar dalam hal pembentukan berbagai macam konstruksi yang ada di kehidupan sosial dan masyarakat, termasuk pembentukan konstruksi mengenai perempuan, baik itu konstruksi yang negatif maupun positif.

Pembahasan terkait dengan perempuan menarik untuk diperbincangkan, terutama jika dikaitkan dengan ranah politik. Menurut Mulia dan Farida (2005:7) dalam buku Perempuan dan Politik, dijelaskan bahwa politik merupakan ranah patriarki yang membutuhkan keberanian, kemandirian, kebebasan berpendapat dan tindakan agresif. Perempuan dalam arena politik masih dinomor-duakan. Hal ini dikarenakan perempuan dianggap lebih mementingkan perasaan daripada rasionalitasnya dan sering kali tidak mumpuni untuk terjun dalam arena politik. Perempuan sering dianggap tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah “penghuni” dapur/domestik, kurang berani mengambil resiko yang semuanya itu sudah menjadi *stereotype* perempuan. Akibatnya, baik laki-laki atau perempuan dan masyarakat secara umum sudah menarik kutub yang berbeda bahwa dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan. Konstruksi pemberitaan perempuan di media pun juga masih bias gender yang mana pemberitaannya masih seringkali menjadikan perempuan selalu tidak lebih unggul dari laki-laki, perempuan hanya dilihat berdasarkan penampilan fisiknya tanpa melihat kapabilitas yang dia miliki, perempuan yang selalu lemah bila tidak ada laki-laki yang menyokongnya.

Lan (2002), menyebutkan bahwa perempuan dalam berbagai pemberitaan di surat kabar masih menunjukkan bahwa mereka belum mengalami kesetaraan. Perempuan masih digambarkan sebagai sosok yang terbelakang, tertindas, dan tidak memiliki otoritas terhadap dirinya, apalagi terhadap masyarakat. Selain itu, frekuensi pemberitaan yang terkait isu perempuan tidak bersifat kontinyu dan masih sering menampilkan perempuan sebagai objek yang dieksploitasi. Tidak

hanya di pemberitaan media massa ataupun di dalam acara-acara yang ada di televisi, dalam pemberitaan perempuan di media *online*-pun perempuan selalu menjadi objek yang subordinat, termarginalkan yang selalu hidup di bawah bayang-bayang laki-laki.

Berbicara mengenai marginalisasi perempuan, Fakhri (2008:14) memberi analisis tentang konsep ini yaitu bagaimana suatu bentuk pemiskinan terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh ketidakadilan gender dan marginalisasi muncul oleh perbedaan gender tersebut. Sedikit berbeda dengan Fakhri, Grijns (dalam Demartoto, 2005:21) memberi tinjauan lain tentang konsep marginalisasi sebagai bentuk proses perubahan hubungan kekuasaan manusia melalui suatu cara, sehingga salah satu kelompok manusia makin terputus aksesnya ke sumber-sumber (tanah, air, modal, pekerjaan, pendidikan, hak politik, dll) yang kian lama semakin dimonopoli oleh elite tertentu.

Langkah awal yang menjadi kajian peneliti dalam penelitian ini adalah memberi batasan pada definisi marginalisasi. Berangkat dari konsep marginal yang dikemukakan Grijns, konsep marginal dalam kajian ini menitikberatkan posisi perempuan pada perubahan hubungan kekuasaan yang mengakibatkan terputusnya akses mereka terhadap hak politik. Dalam penelitian ini marginalisasi perempuan akan dihadapkan pada media *online* yang mewacanakannya melalui pemberitaan, terkhusus berita-berita terkait dengan politik.

Dalam tingkat teori, konsep, dan bahkan juga perundang-undangan yang terdapat di banyak negara termasuk Indonesia, memang sudah diterima dan diakui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban yang sama dalam semua

lini kehidupan, namun pada kenyataannya ketimpangan masih sering terjadi. Ketimpangan dan kesenjangan posisi perempuan di media terlihat dari berita-berita tentang perempuan yang selalu diarahkan pada *frame* yang lebih sempit, kurang porsi pemberitaannya, dan tidak menyentuh substansi dari permasalahan yang dimiliki perempuan.

Contoh konkrit adalah pada saat pesta demokrasi lima tahunan, yaitu pemilihan umum (pemilu). Menarik untuk dilihat kembali bahwa kehadiran perempuan dalam media menjadi salah satu penarik massa dalam kampanye partai-partai politik yang memperebutkan suara di pemilu. Perempuan menjadi 'primadona' dalam setiap percakapan politik, kampanye dan dalam berbagai wacana di media. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perempuan memainkan peran penting dalam menentukan perolehan suara suatu partai. Namun, di sisi lain kehadiran perempuan hanya sebatas pelengkap dalam sistem politik yang berlangsung. Artinya, perempuan hanya untuk penarik perhatian dalam proses kampanye. Hal ini berkebalikan dengan posisi laki-laki yang menjadi aktor utama dalam kancah politik.

Pemberitaan dari situs Detikcom pada tanggal 3 Maret 2014 yang berjudul "Caleg Seksi dan Pengusaha Metromini Ini Ogah 'Nebeng' di Angkot" (<http://news.Detikcom/read/2014/03/03/165915/2513968/10/caleg-seksi-dan-pengusaha-metromini-ini-ogah-nebeng-di-angkot> diakses pada 21 Juni 2014) isi pemberitaannya adalah tentang bakal calon legislatif dalam pemilu, yang lebih ditonjolkan dalam pemberitaannya adalah tentang penampilan fisik dari calon anggota legislatif perempuan yang diberitakan, yaitu mempunyai paras yang

cantik, dan juga tentang kepopulerannya di dunia hiburan sebagai penyanyi dangdut. Secara tidak langsung dalam pemberitaan ini telah terjadi bias gender karena perempuan yang menjadi calon anggota legislatif tersebut tidak dilihat berdasarkan kapabilitasnya dalam dunia politik, tapi lebih kepada penampilan fisik yang bisa dilihat mata dan kepopulerannya di masyarakat sebagai penyanyi dangdut dan kepopulerannya tersebut diyakini bisa membawa perolehan suara yang banyak dalam pemilihan anggota legislatif oleh partai.

Fakih (2008:12) menjelaskan ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan seperti marginalisasi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Kelima isu di atas menjadi *entry point* dalam setiap pembahasan mengenai gender namun banyak isu lain juga ikut andil dalam masalah gender. Satu dengan yang lainnya melekat kuat dalam setiap wacana gender dewasa ini.

Peran serta perempuan dalam ranah politik sebenarnya sangat penting untuk mendorong kebijakan yang berkeadilan sosial di antara laki-laki dan perempuan serta masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan perempuan itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan hukum, kebijakan tersebut juga dapat berlaku untuk melindungi kepentingan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan yang menimpa baik dari segi domestik maupun ranah publik. Fakta yang ada dilapangan menunjukkan bahwa porsi keterwakilan perempuan ditingkat legislatif maupun eksekutif yang berada pada level pengambilan keputusan

(*decision maker*) sangatlah kecil. Dalam penilaian terhadap partisipasi perempuan dalam politik dapat diukur dengan jumlah anggota perempuan di dalam parlemen.

Dalam kajian ini, peneliti menitikberatkan bagaimana peran media *online* Detikcom dalam membangun wacana terkait kehadiran perempuan dalam dunia politik melalui berita yang ditampilkannya. Editor dalam sebuah institusi media dihindangi alam pikiran yang dapat dikategorikan sebagai paradigma yang bias gender. Artinya, perempuan hanya akan mendapat tempat dalam sebuah berita berdasarkan perspektif seorang editor yang kebanyakan adalah laki-laki. Alam pikiran keredaksian yang berorientasi pada kedudukan perempuan sebatas terlibat dalam peran-peran yang tidak penting, secara tidak langsung mempengaruhi wartawan dalam memaknai masalah perempuan. Jadi, permasalahan yang diangkat dalam pemberitaan di sebuah media mengenai posisi perempuan belum menyentuh permasalahan yang paling mendasar, yaitu kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan.

Media *online* yang menjadi media kaji penulis dalam penelitian ini adalah Detikcom. Pemilihan media *online* Detikcom sebagai media kaji dikarenakan beberapa alasan di antaranya karena Detikcom merupakan salah satu *portal* berita *online* yang besar di Indonesia dengan skala nasional sehingga berita yang hadir lebih variatif. Pada tahun 2013 berdasarkan situs pemberi ranking Alexa, Detikcom menempati urutan pertama di Indonesia dalam kategori portal berita *online* dengan *daily visitors*: 1.267.837 dan *daily pageviews*: 7.873.269 serta menurut situs monitor lalu lintas internet *netcraft.com* pun Detikcom tercatat sebagai situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Kini Detikcom

memiliki kantor cabang di kota Surabaya, Bandung dan Yogyakarta, juga beberapa kontributor di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan beberapa berada di luar negeri.

Detikcom merupakan situs *portal* berita *online* yang berada di bawah perusahaan milik Chairul Tanjung yaitu CT Corp, CT Corp mengakuisisi Detikcom (PT Agranet Multicitra Siberkom/Agrakom) pada 3 Agustus 2011. Mulai pada tanggal itulah secara resmi Detikcom berada di bawah Trans Corp. Chairul Tanjung membeli Detikcom secara total (100 persen) dengan nilai US\$60 juta atau Rp 521-540 miliar. Setelah diambil alih, maka selanjutnya jajaran direksi diisi oleh pihak-pihak dari Trans Corp, sebagai perpanjangan tangan CT Corp di ranah media. CT Corp adalah perusahaan yang menginduki perusahaan televisi terbesar di Indonesia yaitu Trans Corp yang saat ini telah berubah nama menjadi Transmedia yang menginduki dua stasiun televisi yaitu Trans TV dan Trans 7. Dalam kapasitasnya untuk mengolah pemberitaan, kebanyakan berita di stasiun TV tersebut cenderung bersifat *feature*, bukan *straight news* yang mana membahas sesuatu secara mendalam, hal-hal yang dibahas di setiap pemberitaannya-pun cenderung hanya di permukaannya tidak dikupas secara tuntas. Berbeda dengan stasiun TV yang memang lebih mengutamakan pemberitaan, seperti Metro TV yang menyajikan pemberitaan yang lebih bersifat *straight news* walaupun pada prakteknya pemberitaan di media ini juga tidak netral selalu ada kepentingan dari konglomerat media. Hal ini tidak hanya berlaku bagi media ini, tetapi hampir semua media di Indonesia pemberitaannya selalu ditunggangi kepentingan dari pemilik modal.

Sebagai salah satu *portal* berita *online* di Indonesia, Detikcom juga menyajikan pemberitaan tentang dinamika politik di Indonesia, yang di dalamnya juga terdapat pemberitaan yang memarjinalisasi perempuan dalam ranah politik. Peneliti menemukan salah satu pemberitaan mengenai korupsi yang dilakukan oleh salah seorang politisi perempuan yang dulunya merupakan gubernur Banten yaitu Ratu Atut Chosiyah, dalam penyajian beritanya yang diangkat secara lebih dalam bukanlah mengenai masalah hukum yang tengah menimpa mantan gubernur tersebut, tapi malah lebih ke penampilan fisik, gaya hidup Ratu Atut, seperti barang-barang yang dipakai oleh Ratu Atut, mulai dari tas, sepatu, pakaian dan sebagainya. Pemakaian kata-kata dalam pemberitaannya pun terkesan ambigu, seperti penggunaan kata polos dalam teks atau narasinya, karena selama ini kata “polos” memiliki asosiasi kepada tubuh yang tidak mengenakan pakaian sama sekali. Kemudian dalam pemberitaan tentang walikota Surabaya yaitu Tri Rismaharini, Detikcom lebih menyoroti *personality* dari Bu Risma, yaitu sifat keibuannya, bukan kepada bagaimana Ibu Risma telah berhasil membawa perubahan yang signifikan di Kota Surabaya dibandingkan dengan pemerintahan yang sebelumnya.

Adapun alasan pemilihan periode penelitian (1 Maret - 30 April 2014), karena periode waktu tersebut merupakan waktu pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu, 16 Maret sampai 5 April 2014. Rentang waktu tersebut merupakan waktu kampanye resmi yang telah ditetapkan KPU melalui Surat Keputusan KPU Nomor 267/KPTS/KPU/Tahun 2014. Selain itu, rentang waktu selama dua bulan

tersebut besar kemungkinan munculnya berita-berita terkait isu-isu politik perempuan di Detikcom, selama masa pemilu Detikcom juga membuat rubrikasi khusus mengenai pemberitaan terkait dinamika pemilu Indonesia dengan nama Detik Pemilu 2014. Dengan bervariasinya berita-berita terkait politik perempuan khususnya posisi perempuan yang marjinal diharapkan dapat menjadi pilihan dalam menganalisis data.

Penelitian tentang figur perempuan di media sebelumnya juga pernah dilakukan, peneliti menemukan penelitian terkait figur perempuan di media massa terdahulu yang pernah dilakukan oleh Vickie Juliani Agnes Prastyo dalam jurnal *Skriptorium*, Vol. 1, No. 3 Universitas Airlangga dengan judul “*Wacana Politisi Perempuan Dalam Surat Kabar*”. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, politisi perempuan diwacanakan dalam surat kabar harian nasional yaitu Jawa Pos dan Kompas sebagai sosok perempuan yang termarginalkan. Dari data yang diperoleh dari surat kabar Kompas dan Jawa Pos ditemukan berbagai wacana mengenai politisi perempuan. Wacana yang dimunculkan dalam surat kabar tersebut tidak lepas dari konsep trilogi konteks situasi milik MAK Halliday. Dalam trilogi konteks situasi pelibat dari setiap pemberitaan hanya sedikit yang menggunakan politisi perempuan yang dijadikan narasumber dalam berita. Yang paling banyak adalah politisi laki-laki. Untuk medan wacana yang dimunculkan, kedua surat kabar menggambarkan berita-berita yang bersifat umum. Tetapi dalam pemberitaan sering kali tampilan gambar yang dimunculkan adalah politisi perempuan.

Menurut kesimpulan dari penelitian tersebut wacana yang dimunculkan adalah politisi perempuan sebagai *konco wingking* yang artinya selalu ada bayang-bayang suami atau ayah dibelakangnya. Kedua media cetak baik Kompas dan Jawa Pos sama-sama menampilkan sosok politisi perempuan yang berada dalam bayang-bayang suami atau ayah dibelakangnya. Inilah yang tampaknya membuat perempuan tidak bebas dalam melakukan tugasnya di ranah publik. Sehingga muncul suatu anggapan bahwa perempuan yang menjadi politisi berkiprah karena adanya peran suami atau ayah dibelakangnya.

Adapun penelitian yang peneliti kaji dimaksudkan untuk melihat wacana yang ingin disampaikan oleh media dalam setiap beritanya. Peneliti sebagai mahasiswa komunikasi ingin melihat bagaimana media mengkonstruksi pesan melalui makna yang tersirat dari setiap pemberitaan, dalam hal ini adalah wacana tentang marjinalisasi perempuan dalam ranah politik dalam pemberitaan di media. Lebih lanjut, setiap berita nantinya akan dianalisis dengan beberapa model yang sesuai dengan data dari berita.

Penelitian mengenai analisis wacana kritis yang melihat teks dan mengaitkan dengan kultur sosial yang ada di masyarakat sangat sesuai untuk menjadi metode dari penelitian ini. Media *online* Detikcom yang melakukan konstruksi atas identitas politisi perempuan yang dalam hal ini selalu mendapat posisi yang marjinal kemudian dikaitkan dengan budaya sosial di masyarakat itu sendiri. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sosok politisiperempuan dengan menggunakan penelitian analisis wacana kritis Norman Fairclough dimana analisis tersebut membagi penelitian menjadi tiga dimensi

yang saling berkesinambungan. Analisis wacana kritis Norman Fairclough melihat penelitian melalui teks, produksi dan konsumsi teks yang mempengaruhi teks tersebut dan mempengaruhi *sociocultural* yang ada di masyarakat. Penelitian ini mencoba untuk menggali lebih jauh tentang permasalahan politisi perempuan di media dalam hal ini adalah di media *online* Detikcom. Penelitian ini diharapkan bisa menjawab pertanyaan tentang bagaimana media *online* Detikcom membangun wacana mengenai marjinalisasi perempuan dalam ranah politik di dalam pemberitaan mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti ingin mengetahui “*Bagaimana perempuan dalam politik diwacanakan di media online Detikcom?*”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan struktur sosial mengenai politisi perempuan yang dibangun oleh media online Detikcom.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Akademis : Penelitian ini bermanfaat untuk mengkaji kajian ilmu komunikasi terutama dalam metode penelitian analisis wacana.

2. Manfaat Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat semakin kritis dalam mengkonsumsi media, membuat mereka tahu bahwa dalam pemberitaan di Detikcom selalu ada kepentingan dibaliknya.

E. Penelitian Terdahulu

Mengetahui penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian merupakan hal penting dan akan memberikan banyak masukan untuk keperluan analisis dan proses berpikir peneliti. Selain itu juga menekankan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat memberikan masukan untuk penelitian ini baik dalam metode maupun isu yang serupa. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian jurnalisme berbasis gender di media massa adalah sebagai berikut:

- a. Diskriminasi Perempuan Dalam Berita Harian *Surya*: Kajian Wacana Kritis, penulis Wieke Ayu Pratiwi.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa permasalahan gender dalam media cetak masih menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan karena media cetak masih menampilkan peristiwa secara faktual tanpa disertai perspektif gender. Diskriminasi terhadap perempuan yang sering ditemui di media cetak mengenai pemberitaan pemerkosaan, pelecehan seksual dan perempuan menjadi korban.

- b. Representasi Perempuan Pelaku Kejahatan (*Woman Offender*) di Media Massa: Analisa Pemberitaan *Malinda Dee*, penulis Nurul Hasfi.

Pemberitaan *Malinda Dee* hanyalah satu di antara ratusan berita bias gender yang masih dipraktikkan jurnalisme di Indonesia. *Malinda Dee* yang dalam hal ini menjadi obyek kekerasan simbolik dengan munculnya *stereotype* dan *label* yang merepresentasikan dirinya sebagai bentuk kekerasan simbolik yang dilakukan oleh media massa. Berdasarkan pengamatan penulis, hampir semua media massa memberitakan dengan *style* yang sama dimana pemberitaan keluar dari konteks permasalahan yaitu kasus penipuan yang dilakukan *Malinda Dee*. Yang menjadi sorotan justru sosok *Malinda Dee* yang terangkum dalam beberapa frame seperti perempuan sebagai monster mistik (*mythical monster*), pemfokusan pada daya tarik fisik (*physical attractiveness*), perempuan yang menjadi obyek humor (*object of humour*) dan perempuan selalu berada di posisi yang salah. Bisa dibayangkan frame dan *stereotype* yang muncul di atas adalah bentuk dari pemberitaan bias gender. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak termasuk praktisi media agar lebih menggiatkan konsep jurnalisme berperspektif gender. Ada juga istilah yang muncul di Swedia yaitu *feminization journalism* atau mem-fenisme-kan jurnalisme.

- c. Wacana Politisi Perempuan Dalam Surat Kabar, penulis Vickie Juliani Agnes Prastyo

Wacana yang dimunculkan adalah politisi perempuan sebagai *konco wingking* yang artinya selalu ada bayang-bayang suami atau ayah

dibelakangnya. Kedua media cetak baik Kompas dan Jawa Pos sama-sama menampilkan sosok politisi perempuan yang berada dalam bayang-bayang suami atau ayah dibelakangnya. Inilah yang tampaknya membuat perempuan tidak bebas dalam melakukan tugasnya di ranah publik. Sehingga muncul suatu anggapan bahwa perempuan yang menjadi politisi berkiprah karena adanya peran suami atau ayah dibelakangnya.

F. Kerangka Teori

1. Paradigma Kritis Dalam “Membaca” Berita

Agus Salim menyitir pendapat Poerwandari (1994:14), mengatakan bahwa paradigma merupakan seperangkat proposisi (pernyataan) yang menerangkan bagaimana dunia dan kehidupan secara umum dipersepsikan. Paradigma seringkali disetarakan dengan ‘perspektif’ atau ‘sudut pandang’. Paradigma juga dimaknai sebagai “ideologi dan praktik” suatu komunitas ilmuwan yang menganut suatu pandangan yang sama atas realitas, memiliki seperangkat kriteria yang sama untuk menilai aktivitas penelitian, dan menggunakan metode serupa”.

Hal senada diungkapkan Bogdan dan Biklen (1982:32), bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Paradigma juga sering disebut sebagai rangkaian model yang digunakan dalam penelitian guna memperoleh suatu kebenaran.

Munculnya paradigma kritis dilatarbelakangi oleh kritik tajam dari Mahzab Frankfurt yang muncul pada tahun 1923 oleh Max Horkheimer, Herbert

Marcuse dan Theodor Adorno. Mazhab Frankfurt dipengaruhi oleh pemikiran marxisme yang mengkritik kapitalisme dan determinasi ekonomi pada saat itu. Kritik tajam Mahzab Frankfurt tersebut muncul ketika proses propaganda besar-besaran Hitler yang pada saat itu media menjadi alat dari pemerintah untuk mengontrol publik, dan menjadi sarana pemerintah untuk mengobarkan semangat perang. Paradigma kritis berfokus, menaruh perhatian dan melakukan kritik kepada media (Eriyanto, 2012:23).

Pandangan paradigma kritis tidak lagi melihat media sebagai sebuah medium yang netral seperti pandangan paradigma yang lain. Pandangan paradigma kritis melihat bahwa media merupakan alat dan sistem yang dilakukan untuk membentuk, mengukuhkan dan memarjinalkan kelompok yang tidak dominan oleh kelompok dominan. Media merupakan *channel* mengkonstruksi realitas dan peristiwa, dimana menurut pandangan positivistik merupakan sebuah kenyataan dan telah dikonstruksi secara alami dengan sendirinya. Pandangan paradigma positivistik tersebut ditentang oleh pandangan paradigma kritis. Pandangan kritis melihat bahwa media tidak lagi bersifat netral yang mengkonstruksi realitas dengan sebenar-benarnya. Realitas yang dibentuk oleh media merupakan sebuah realitas yang semu. Realitas yang dibentuk oleh media sudah dipengaruhi dan dimodifikasi oleh cara pandang kelompok dominan dalam melihat realitas. Pendapat mengenai realitas yang dibentuk media tersebut ditegaskan oleh Stuart Hall. Hall berpendapat bahwa realitas sesungguhnya bukanlah seperangkat fakta. Realitas dalam media merupakan hasil dari

pandangan kelompok-kelompok tertentu dalam membentuk realitas tersebut (Hall dalam Eriyanto, 2012:29).

Paradigma kritis sangat menaruh perhatian terhadap pembongkaran aspek-aspek yang tersembunyi (*latent*) di balik sebuah kenyataan yang tampak (*virtual reality*) guna dilakukannya kritik dan perubahan terhadap struktur sosial. Dengan demikian, menurut paradigma ini pesan yang disampaikan dalam pemberitaan di media adalah realitas yang teramati sebagai konstruksi para pembuatnya yang dipengaruhi oleh faktor lain, di antaranya, permintaan pasar dan sistem sosial yang ada di masyarakat. Salah satu konsekuensi penggunaan paradigma kritis adalah keharusan dipertimbangkannya aspek-aspek historis dan faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi-politik yang mempengaruhi masalah sosial yang menjadi masalah penelitian.

Secara ontologis, paradigma kritis beranggapan bahwa realitas yang kita lihat adalah realitas semu, yaitu realitas yang telah terbentuk dan dipengaruhi kekuatan sosial, politik, budaya, ekonomi, etnik, nilai gender, dan sebagainya, serta telah terkristalisasi dalam waktu yang panjang. Tujuan utama penelitian ini sendiri adalah untuk mengungkapkan ideologi atau faktor-faktor apa sajakah yang terdapat dalam konstruksi realitas yang ada di dalam berita.

Pada tataran epistemologis, paradigma kritis melihat hubungan antara peneliti dan realitas yang diteliti selalu dijembatani oleh nilai-nilai. Dalam rangka memahami suatu realitas peneliti mesti menggunakan perspektif pelaku pembentuk realitas. Realitas harus dipahami sebagai kenyataan yang telah diperantarai oleh nilai-nilai (*value mediated findings*) antara subjek dengan

realitas sebenarnya. Dalam hal ini isi pemberitaan merupakan realitas simbolik, yaitu ekspresi simbolik dari realitas objektif (kenyataan).

Kelompok dominan memiliki akses dan sarana kepada media untuk membentuk realitas yang mereka pahami. Paradigma kritis juga melihat sesuatu yang tersembunyi dibalik media yakni aktor, pembuat dan penguasa dibalik media yang juga merupakan kelompok dominan sebagai pemilik modal. Kelompok dominan dan kapitalis media memiliki kontrol kepada media massa dalam pekerjaannya mengkonstruksi realitas. Mereka juga memanfaatkan media sebagai akses dan sarana untuk meraih keuntungan dari konstruksi realitas tersebut. Realitas yang dikonstruksi oleh media menurut pandangan paradigma kritis adalah hasil dari dominasi kelompok dominan yang menggunakan media untuk memodifikasi realitas demi kepentingannya.

Media dalam konteks paradigma kritis yang selalu melakukan konstruksi realitas atas kontrol dari kelompok dominan tak ubahnya melakukan hegemoni dan membentuk ideologi media. Hegemoni adalah sebuah proses dominasi kelompok dominan atau kapitalis menggunakan kepemimpinannya untuk menguasai kelompok yang lain, yakni kelompok yang tidak dominan atau khalayak. Kelompok dominan melakukan hegemoni baik dalam dunia politik, ekonomi, sosial budaya dan ideologi itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan definisi hegemoni menurut Gramsci yakni sebuah proses untuk membentuk dan menggulingkan keseimbangan oleh kelompok yang memiliki kepentingan kepada kelompok subordinat, keseimbangan tersebut kemudian menjadi kepentingan dari kelompok dominan.

Melalui hegemoni, ideologi dari kelompok dominan dapat disebarkan, kemudian nilai dan kepercayaan dapat ditularkan. Ideologi yang ditularkan tersebut kemudian juga mendominasi dalam kehidupan sosial. Media sebagai pembentuk sebuah ideologi yang diciptakan atas kelompok dominan yang memiliki kekuasaan dalam mengakses media. Media telah memainkan peranan yang sangat penting atas praktik-praktik hegemoni yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelas dominan. Maka, media menjadi sarana dan *channel* untuk melegitimasi dan mengontrol wacana dominan yang dilakukan kelompok dominan atau kapitalis kepada publik (Gramsci dalam Fairclough, 2006:92).

Proses membentuk realitas dalam media menitik beratkan kepada bahasa. Bahasa adalah alat untuk mengkonsep dan menarasikan realitas. Seluruh isi media baik cetak maupun elektronik menggunakan bahasa untuk membentuk makna dan wacana. Paradigma kritis melihat bahasa dalam media tidak lagi sebagai alat untuk menggambarkan dan menarasikan realitas. Media menggunakan bahasa untuk membentuk wacana dan makna yang mereka inginkan mengenai realitas. Maka bahasa menjadi tumpuan karena bahasa dilihat dari perspektif ideologi artinya bahasa dapat dilihat dalam konstruksi ideologis subjek. Bahasa tidak lagi dipahami sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa menurut Bourdieu merupakan instrumen kekuasaan yang menjadi *doxa*, yakni kebenaran partikular yang dibenarkan oleh kelompok dominan yang seolah-olah merupakan kebenaran secara universal. Kelompok dominan tidak perlu melalui perjuangan untuk melakukan praktik bahasa, karena kelompok dominan memiliki pengaruh atas

bagaimana bahasa itu dikonstruksi yang kemudian kelompok lain mengikuti atau membenarkan apa yang dikatakan oleh kelompok dominan tersebut. Bahasa digunakan untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan subjek yang membentuk bahasa. Maka dalam hal ini bahasa membentuk sebuah wacana dominan.

Menurut DeFleur dan Rokeach dalam Hamad mengenai cara media untuk merubah realitas menggunakan bahasa adalah dengan merubah, mengembangkan kata atau istilah-istilah baru dengan tujuan untuk menggantikan makna yang lama menjadi sebuah istilah dan makna yang baru. Bahasa tidak hanya bertugas untuk menggambarkan realitas, namun dalam pandangan paradigma kritis bahasa juga menciptakan realitas tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Giles dan Wiemann dalam Halim (2004:12-14) bahwa “bahasa (teks) mampu menentukan konteks bukan sebaliknya teks yang menyesuaikan diri kepada konteks”. Dalam hal ini ada politik atas pembentukan bahasa yang dilakukan oleh para kelompok dominan.

Penelitian ini menitikberatkan definisi komunikasi sebagai proses membentuk pemahaman khalayak melalui pesan yang disampaikan oleh media. Artinya, khalayak diarahkan untuk memaknai pesan-pesan yang disampaikan media. Hal ini sesuai dengan kajian Fiske tentang komunikasi sebagai suatu proses yang dengannya seorang pribadi mempengaruhi perilaku atau *state of mind* pribadi yang lain (John Fiske, 2004: 8). Dengan kata lain konsep komunikasi yang diusung Fiske merupakan upaya mentransmisikan makna yang terkandung dalam pesan yang pada akhirnya menciptakan persepsi bagi khalayak. Bagi Fiske

(2004:13) komunikasi tak lain adalah proses dari *generation of meaning* (pembangkit makna). Ia melihat bahwa fenomena komunikasi tidak sekedar dipahami sebagai suatu proses saja. Pesan dilihat tidak sekedar sesuatu yang dikirim dari media ke khalayak. Lebih dari itu Fiske melihat pesan komunikasi merupakan suatu elemen di dalam struktur hubungan antara pengirim (*produser*) dan juga pembaca (*reader*). Pesan itu sendiri merupakan konstruksi makna yang pada saat bersinggungan dengan penerima (*receiver*) akan memproduksi makna. Artinya makna ini perlu dipahami bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan komunikasi.

Sejalan dengan itu, Susanto (1980:1-2) melihat hubungan yang serasi antara pengirim dan penerima pesan hanya dapat dicapai apabila pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi memberi arti dan makna yang sama kepada lambang-lambang yang dipergunakan. Karena itu pemberian arti kepada lambang merupakan landasan pokok untuk suatu komunikasi yang serasi, terutama karena manusia hidup dalam masyarakatnya melalui komunikasi.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengungkap realitas media melalui penafsiran makna yang tersirat dari berita yang disampaikan. Hal penting yang perlu dicermati adalah konstruksi makna yang dibangun oleh media melalui beritanya. Konstruksi ini tercakup dalam pesan yang dimuat dalam berita surat kabar.

Kurt Lang dan Gladys Engel Lang dalam *International Journal of Communication* (2008) menjelaskan “*one of the great achievements of the press was to move conversation beyond small talk to “bigger” things, to persons and*

images, as we might say today, that have caught the public's attention". Dalam hal ini pers mampu membangun suatu yang kecil menjadi suatu yang besar dan menjadi perhatian khalayak, Detikcom membangun wacana tentang posisi politisi perempuan dalam pemberitaan. Pengaruh media yang begitu kuatnya terhadap masyarakat hingga Morissan (2008:14) mengatakan jika media merupakan organisasi yang menyebarkan informasi yang berupa produk budaya atau pesan yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, seperti politik atau ekonomi, media menjadi sistem tersendiri yang merupakan bagian dari kemasyarakatan yang lebih luas.

Di hadapan khalayak, media memiliki kredibilitas dan tanggung jawab serta posisi yang tinggi. Alasannya, karena media merupakan corong informasi dan masyarakat percaya media tidak akan pernah salah. Namun, kadang kala apa yang dikemukakan media belum sepenuhnya berasal dari kebenaran fakta tergantung kepentingan yang ada di belakangnya. Tak jarang, berita media lebih condong mengarahkan pada ideologi-ideologi tertentu, apapun motifnya. Lantas, bagaimana media membangun pesan yang tidak memarjinalkan golongan atau kelompok tertentu. Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa berita merupakan ujung tombak bagi media dalam menyampaikan pesan kepada pembacanya. Berita bermula dari berbagai kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, namun tidak setiap kejadian atau peristiwa dapat dikatakan berita. Dan Nimmo (1993:217) memberi definisi berita sebagai laporan yang bermakna tentang peristiwa, laporan yang menyangkut pilihan beberapa orang (terutama wartawan) yang melakukan pilihan dan memberi nama, menginterpretasikan dan

memberi bentuk pada kejadian yang diketahui. Pokok persoalan bagaimana pesan-pesan dibentuk dan dikonstruksi dalam sebuah berita hingga sampai ke khalayak pembaca.

Berangkat dari sana, representasi perempuan menjadi penting dalam berita. Hal ini disebabkan makna yang terkandung dalam berita sepenuhnya dikontrol oleh media. Bangunan realitas media menentukan posisi perempuan dalam berita. Dengan kata lain, konstruksi pesan yang termuat dalam berita ikut mempengaruhi posisi perempuan di masyarakat. DeFleur dan Ball-Rokeach mengatakan melalui narasi, proposisi, di sisi lain dalam cakupan yang lebih besar, media bisa mempengaruhi bahasa dan makna, di antaranya mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatifnya, menggeser, memperluas, mempersempit, atau menyerderhanakan makna (dalam Mursito, 2006:115). Jadi, dalam kajian ini, media melalui beritanya mengkonstruksi dan menciptakan makna terhadap suatu kelompok atau golongan yang mana dalam penelitian ini mengkonstruksi tentang marginalisasi perempuan yang ada di ranah politik.

2. Bias Gender Dalam Pesan Media

Istilah gender dalam khasanah bahasa Indonesia, diadopsi dari bahasa Inggris yang berarti 'jenis kelamin'. Membedah konsep gender tidak terlepas dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Dalam konsep sosial-budaya gender mengarahkan kita pada adanya fungsi, peran (*role*), dan kedudukan (*status*) laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Ann Oakley dalam bukunya *Sex, Gender, and Society* memberi makna gender sebagai perbedaan jenis kelamin yang bukan

biologis dan bukan kodrat Tuhan (dalam Fakih, 2008:171). Sejalan dengan Oakley, Macionis juga memberi gambaran yang sama tentang konsep gender yaitu perbedaan psikologis, sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan (Kamanto Sunarto, 2000:127). Isu gender bukanlah sesuatu hal yang baru. Gender telah ada sejak manusia lahir dan kajian perihal konsep gender merupakan studi yang banyak memfokuskan isu-isu pada seputar persoalan perempuan secara kultural. Berdasarkan banyak studi yang dilakukan dengan menggunakan analisis gender di masyarakat selama ini menunjukkan bahwa banyak manifestasi ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan.

Sita Van Bammelen (1992), dalam penelitiannya tentang iklan-iklan di Barat membuktikan bahwa perempuan digambarkan secara seragam, yaitu tempat perempuan ada di rumah, tergantung pria, diperlihatkan dalam sedikit profesi, dan ditampilkan dalam objek seksual. Pendek kata, perempuan banyak digambarkan dalam *stereotype* tradisional yang cenderung merendahkan posisi perempuan di hadapan laki-laki (dalam Rendra Widyatama, 2007:42-43). Dalam konsep sosial budaya, gender mengarahkan kita pada adanya fungsi, peran (*role*), dan kedudukan (*status*) laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Fungsi, peran, dan kedudukan laki-laki dan perempuan dikonstruksi oleh masyarakat, sehingga definisi gender belum tentu sama antara tempat-tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Berhubungan dengan peran dan kedudukan, Soekanto mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis dari sebuah kedudukan. Lebih lanjut ia mengatakan peranan seseorang dapat mengatur perilaku seseorang dan membawa seseorang

pada batas-batas tertentu sehingga dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain (Soekanto, 2005:243).

Maggie Humm dalam Kasiyan (2008:26) juga memberi pengertian tentang istilah gender. Dalam bukunya yang berjudul *Ensiklopedia Feminisme*, Humm mendefinisikan gender sebagai suatu kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara *cultural* yang ada pada laki-laki dan perempuan. Jadi, gender bukanlah suatu konsep yang membedakan laki-laki dan perempuan secara lahiriah atau biologis tapi suatu hasil yang telah dikonstruksi oleh nilai-nilai sosial-budaya masyarakat.

Oleh karenanya gender berkaitan erat dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Dengan demikian gender dapat dikatakan pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk dan dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Menurut Julia Cleves Mosses secara mendasar gender berbeda dengan jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian (*given*), yakni kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Akan tetapi jalan menjadikan kita feminisme atau maskulin (dalam Kasiyan 2008:29).

Senada dengan Mosses, Nugroho (2008:9) memberi gambaran tentang konsep gender keterkaitannya dengan feminisme dan maskulinitas. Nugroho menyebutkan feminis dipakai untuk mewakili sifat dan karakteristik yang dimiliki perempuan, sedangkan untuk laki-laki diwakilkan dengan istilah maskulin.

Menurut asal katanya feminis berasal dari bahasa latin, yaitu *femina* yang berarti memiliki sifat perempuan

Teori sosial yang kini dijumpai banyak melihat pengertian konsep gender dari sudut pandang feminis dan maskulin. Feminis dan maskulin adalah dua kata yang selalu bertolak belakang. Dallinger dan Kilgalen merumuskan bahwa perbedaan sifat antara feminis dan maskulin adalah sesuatu hal yang kontradiktif. Dallinger dan Kilgalen berpendapat “*To be masculine is to be strong, ambitious, successful, rational, and emotionally controlled. To be feminine is to be attractive, deferential, unaggressive, emotional, nurturing, and concerned with people and relationships* (Dallinger dan Kilgalen dalam Wood, 2000:22).

Dalam penelitian ini yang menjadi titik berat lebih kepada teori-teori gender yang berkaitan dengan femininitas dan tidak terlalu memberi porsi lebih pada hal-hal yang berkaitan dengan maskulinitas. Berbicara tentang feminisme, Mansour Fakih dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* membedakan gerakan feminisme menjadi dua aliran besar yakni aliran *status quo* atau fungsionalisme dan aliran konflik. Namun, pada buku yang sama Mansour Fakih mengutip pendapat Rosemarie Tong (1989) yang menjelaskan ragam usaha feminis ke dalam beberapa aliran diantaranya Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Marxis, Feminisme Sosialis, dan Eco-feminis (Mansour Fakih, 2008:78-79).

Lebih jauh Fakih menjelaskan bahwa gerakan feminisme mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut

(Mansour Fakih, 2008: 99). Lebih spesifik lagi feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibanding dengan laki-laki di masyarakat. Lengermann dan Niebrugge-Brantley mengemukakan bahwa khusus untuk pemikiran feminis, pandangan sosial terhadap perempuan telah ada sejak tahun 1600 M dan merupakan landasan bagi pemikiran feminis masa kini (dalam Sunarto, 2000 :122).

Pendapat lain yang mengemukakan perihal feminisme adalah Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan (1993:8) yang mengatakan feminisme pada hakikatnya adalah gerakan untuk mencapai kesederajatan atau kesetaraan harkat serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah. Berbeda dengan gender, seks merupakan kodrat yang sudah ditentukan sejak lahir yaitu berupa perbedaan jenis kelamin. Jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan laki-laki telah menjadi ketentuan yang tidak bisa diganggu gugat. Berbicara tentang perempuan dan laki-laki tidak bisa dilepaskan dari sifat dasar mereka. Perempuan sering diidentikan dengan kata lembut, perasa, dan sopan sedangkan laki-laki bersifat kuat, angkuh, tidak sopan.

Burhan Bungin berpendapat seks dalam masyarakat selalu digambarkan sebagai kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Bungin menerangkan jika dalam masyarakat patriarki seks merupakan bagian yang dominan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, dan selalu menempatkan perempuan sebagai subordinasi (Burhan Bungin, 2008:114). Berangkat dari argumen ini, Penelope Brown dalam Graddol dan Swann (1989:145) mengatakan perempuan lebih banyak

menggunakan indikator-indikator kesopanan dibanding laki-laki, dan mereka juga mempunyai “strategi-strategi feminim secara khas mengenai kesopanan”.

Dengan demikian perbedaan gender dan jenis kelamin (*sex*) dapat berubah, dapat dipertukarkan, tergantung waktu, budaya setempat dan bukan merupakan kodrat Tuhan, melainkan buatan manusia. Lain halnya dengan seks yang tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku dimana saja, tidak dapat dimanipulasi dan dikonstruksi oleh pengaruh apapun.

Secara biologis dan sifatnya kodratiah, perempuan memang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan ini berimbas pada peran dan tugas reproduksi antara mereka dalam ranah publik. Perbedaan makin meruncing ketika peran masing-masing dibedakan dari segi kodratiahnya. Perempuan mampu berperan dalam proses-proses reproduksi seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak. Persoalan timbul ketika orang-orang mulai membahasnya tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut secara psikologis (Kasiyan, 2008:32).

Selain marjinalisasi, isu subordinasi adalah pil pahit yang juga harus ditelan kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat, maupun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa 'menganggap penting' kaum perempuan. Misalnya, anggapan “perempuan toh nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi”, adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan (Fakih, 2008:172).

Selain itu, isu *stereotype* (pelabelan negatif) terhadap perempuan juga patut untuk dikritisi. *Stereotype* tidak lepas kaitannya dengan seks dan gender, yaitu suatu konsep sosial yang berhubungan dengan pembedaan (*distinction*)

karakter psikologi dan fungsi sosial antara perempuan dan laki-laki yang dikaitkan dengan anatomi jenis kelaminnya (*sex*). Masyarakat manapun, termasuk Indonesia masih percaya pada mitos bahwa laki-laki berada di wilayah kiri (aktif, berkuasa, beradab, rasional, cerdas, dan memiliki jiwa kepemimpinan) sedangkan perempuan di wilayah kanan (pasif, dekat dengan alam, emosional, kurang cerdas, lemah, dan tidak mampu memimpin).

Dalam masyarakat banyak sekali *stereotype* yang ditujukan pada kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan (Fakih, 2008:173). *Stereotype* muncul karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai ‘tambahan’ dan oleh karenanya perempuan dibayar lebih rendah dibanding dengan laki-laki.

Menilik berbagai ketimpangan posisi antara laki-laki dan perempuan faktor penyebab kesenjangan gender tidak lain disebabkan oleh tata nilai sosial budaya yang dianut oleh suatu masyarakat. Umumnya sistem yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan (*ideologi patriarki*) begitu kuat tertanam dalam masyarakat. Suatu tatanan sosial dimana patriarki berakar kuat di masyarakat, secara turun-temurun diwariskan melalui budaya, adat-istiadat, dan norma-norma maka peran sosial perempuan menjadi terpinggirkan.

Mengingat perempuan selalu terpojokan melalui isu-su gender, maka dalam penelitian ini penulis mengaitkan perempuan dengan media, khususnya media baru (*media online*). Fokusnya, bagaimana *media online* dengan berita-beritanya memunculkan sosok politisi perempuan. Hal ini penting karena media

dengan slogan independensinya masih cenderung mengusung berita-berita yang bias gender. Ashadi Siregar, dkk (1999:374) mengatakan berita (*news*), teks atau diskursus media yang hadir di hadapan khalayak pembaca bukanlah sesuatu yang berdiri netral-otonom pada dirinya. Ia menjadi realitas baru yakni realitas yang sudah dipermak oleh rangkaian corak penyensoran yang tidak hanya muncul dari luar media, tapi juga bersemi di rahim pembuat berita itu sendiri. Artinya, berita masih mengandung wacana yang tersembunyi dan patut untuk dianalisis. Konstruksi pesan yang bias gender melalui berita di media *online* Detikcom merupakan pokok kajian penulis dalam penelitian ini.

3. Perempuan Dalam Ranah Politik

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik sama saja dengan membicarakan negara, karena teori politik membicarakan negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat. Politik dalam bahasa Arabnya disebut “*siyasyah*” atau dalam bahasa Inggrisnya “*politics*”. Politik itu sendiri berarti cerdas atau bijaksana (Syaffie, 1997:18).

Menyinggung pengertian politik dari Aristoteles, sebagai salah seorang yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu politik Aristoteles berargumen bahwa aspek penting dari politik adalah adanya otoritas atau pemerintah. Ia merumuskan bahwa politik adalah badan yang paling berkuasa dan paling inklusif dan konstitusi atau ‘*polity*’ sebagai organisasi sebuah kota (Robert Dahl, 1985:12). Walaupun definisi politik menurut Aristoteles masih dalam lingkup yang sempit

yaitu dalam Negara kota, namun makna yang ingin dijelaskan dalam setiap kata mengandung hal-hal dasar yang digunakan pada saat ini.

Menurut asal katanya Robert Dahl memberi definisi politik sebagai hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan (Dahl: 1985:19). Saat ini makna politik dipersempit lagi dengan orientasi hanya pada sebuah kekuasaan. Jika ditilik lebih dalam lagi ruang lingkup ilmu politik berkembang semakin luas mencakup kebijakan pemerintah, politik ekonomi, pembangunan politik, sosiologi politik, komputerisasi politik, perimbangan politik, filsafat politik dan psikologi politik dalam penguasaan massa.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik suatu negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dari uraian tentang definisi politik di atas Miriam Budiardjo (2002:9) menyimpulkan beberapa konsep-konsep pokok dari politik itu sendiri diantaranya, 1) Negara (*state*), 2) Kekuasaan (*power*), 3) Pengambilan keputusan (*decision making*), 4) Kebijakan (*policy*), 5) Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Dalam kajian ini yang menjadi pokok persoalan adalah bagian terakhir dari unsur-unsur politik di atas yaitu pembagian (*distribution*). Pembagian yang dimaksud adalah pembagian kesempatan terutama dalam hal yang menyangkut kebijakan (*policy*) dan pengambilan keputusan (*decision making*). Minimnya pembagian kesempatan ini memicu rendahnya partisipasi politik perempuan. Selain itu, Dye dan Zeigler (1986) mengidentifikasi fungsi politis media massa.

Fungsi tersebut meliputi lima hal pokok, yaitu (a) fungsi pemberitaan, (b) fungsi interpretasi, (c) fungsi sosialisasi, (d) persuasi, dan (e) fungsi pengagendaan isu (dalam Pawito, 2009:95). Berdasar fungsi di atas maka dapat ditarik benang merah dalam hal ini media massa melakukan fungsi pemberitaan.

Namun, yang lebih penting dalam kajian ini ialah fungsi pengagendaan isu. Isu yang ditekankan di sini ialah terkait partisipasi perempuan dalam ranah publik, khususnya bidang politik. Menurut publikasi dari UNDP “Indonesia dalam Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah”, gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Mereka belum terwakili secara setara di lembaga legislatif tingkat nasional sejak tahun 1955, ketika perempuan menduduki 5,9% kursi di parlemen. Meskipun telah ada kecenderungan meningkat dalam hal keterwakilan perempuan sejak tahun 1971, ada beberapa pengecualian, termasuk pada Pemilu 1977 ketika jumlah perempuan terpilih melorot dari 7,8% menjadi 6,3% jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya (1971) dan kembali mengalami penurunan lagi pada pemilu 1999 menjadi 9% jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya sebesar 10,8% pada tahun 1997. Meskipun demikian peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI pada dua pemilu terakhir, 11,8% pada tahun 2004, dan 18% pada pemilu 2009 cukup substantif.

Partisipasi politik merupakan salah satu prasyarat terlaksananya demokrasi. Karena tidak ada demokrasi yang sesungguhnya jika masih terdapat pengingkaran kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga ‘tersingkirnya’

perempuan dari gelanggang politik. Kehidupan demokrasi yang sejati adalah kehidupan dimana semua anggota masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk bersuara dan didengar. Peran politik sangat penting untuk mendorong kebijakan yang berkeadilan sosial, terutama yang berkaitan dengan kehidupan perempuan.

Sementara melalui kebijakan, hukum dapat berlaku melindungi kepentingan kaum perempuan dari berbagai bentuk kekerasan baik domestik maupun publik. Dengan masuknya perempuan dalam ranah politik diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap produk-produk kebijakan yang dihasilkan, khususnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak perempuan baik secara politik maupun secara kemanusiaan. Karena pada dasarnya hak politik perempuan dalam arti luas adalah bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, dan sebaliknya.

Sebuah survey yang dilakukan oleh *National Democratic Institute* (NDI) menyatakan bahwa negara-negara yang memperlakukan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan memiliki keunggulan-keunggulan antara lain: standar hidup yang tinggi/lebih baik dan angka korupsi yang cenderung lebih rendah; keterlibatan perempuan dalam semua level, baik lokal, regional maupun nasional memiliki dampak positif pada kehidupan sosial ekonomi warganya, keluarga-keluarga serta kelompok-kelompok yang kurang beruntung; dalam masa rekonsiliasi dan rekonstruksi pasca perang atau bencana, pelibatan perempuan mempercepat proses-proses yang dilakukan. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya semacam pemahaman yang komprehensif yang didapat dari adanya sinergi

antara persepsi, formulasi dan implementasi antara laki-laki dan perempuan. Jika selama ini setiap keputusan berasal dari isi kepala para laki-laki, maka dengan terbukanya kesempatan perempuan berperan dalam pengambilan keputusan maka yang muncul adalah *counterpart* ide, gagasan dan solusi dari pihak perempuan. Bisa jadi hal tersebut menjadi saling melengkapi dengan hal-hal yang telah ada atau malah menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada karena perbedaan persepsi, emosi dan psikologi antara laki-laki dan perempuan. Dapat dinyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan di ruang publik/ranah politik justru memperkaya dan memperlengkap wacana dan pendekatan dalam mengambil keputusan.

Dari penelitian Farida Nurland (2002), paling tidak ada 3 hal yang menjadi kendala peran perempuan pada ranah politik di Indonesia. *Pertama*, faktor budaya Indonesia yang feodal dan patriarki yang mengungkung perempuan untuk beraktualisasi pada ranah-ranah domestik. Secara tradisi, perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yakni hanya berpusat pada aktifitas rumah tangga. Bahkan ada semacam jargon orang tua yang enggan untuk menyekolahkan anak perempuannya karena paling nanti hanya akan diambil istri dan mengurus rumah tangga saja. Hal semacam ini terus-menerus diturunkan pada setiap generasi sehingga menjadi sebuah nilai yang berlaku dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan perempuan. *Kedua*, adanya pemahaman masyarakat yang konservatif atas tafsir ajaran agama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dalil atau hukum agama yang memberikan keistimewaan kepada pihak laki-laki. Sungguh pun bahwa dalil

dan hukum tersebut sifatnya adalah tafsir, namun proses sosialisasi yang terus-menerus dapat menjadikan hal tersebut sebagai sebuah dogma/hukum yang tak terbantahkan. Padahal jika dikaji secara lebih mendalam maka agama pun sebenarnya memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan, bahkan mereka dianjurkan untuk saling bekerja sama. *Ketiga*, munculnya hegemoni negara yang masih sangat besar terhadap warga negara yang terlihat dari dukungan atas budaya patriarki dalam segala aspek. Hal ini seperti yang ditentang oleh banyak aktivis perempuan mengenai Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi yang masih menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek dan diskriminatif. Perempuan dianggap sebagai pihak yang paling bersalah atas munculnya kejahatan susila. Dengan demikian, dari kacamata ini perempuanlah yang harus membatasi dirinya dan memperlakukan dirinya secara sopan dan terhormat. Bagi aktivis perempuan hal ini dianggap tidak adil karena negara tidak juga memperlakukan hal yang sama kepada laki-laki. Dengan kata lain, Negara masih saja menerapkan diskriminasi susila kepada perempuan dengan mengatur secara mendetail apa-apa yang patut dan boleh dilakukan oleh perempuan.

4. Wacana dan Ideologi

Saat ini pembahasan analisa wacana telah melampaui pakem-pakem linguistik konvensional, yang hanya berkuat dengan *text* dan *talk* serta tidak melibatkan faktor-faktor sosio-politis dan ideologis. Pengaruh kajian Post Struktural dan Teori Kritis terhadap dunia pemikiran telah membentuk mazhab baru di dunia ilmu pengetahuan, termasuk linguistik yang saat ini telah

berkembang menjadi Linguistik Kritis (*Critical Linguistics*), fokusnya adalah Analisa Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, Teun Van Dijk dll.

Wacana di sini tidaklah dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi menurut Foucault adalah sesuatu yang memproduksi yang lain, diantaranya sebuah gagasan konsep atau efek. Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu.

Antara wacana dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik, seperti yang dikatakan Foucault, elemen taktis ini sangat terkait dengan kajian strategis dan politis, tapi tentu saja istilah politik di sini tidak selalu berarti faktor-faktor pemerintahan, segala sesuatu yang meng-hegemoni baik itu secara *cultural* maupun secara ideologis sebenarnya memiliki konstruksi politisnya sendiri. Kontrol dan membentuk individu yang patuh dan disiplin adalah wujud kekuasaan yang ada dimana-mana. Bagi Foucault, kekuasaan ada dimana-mana (*omnipresent*), yang selalu dinyatakan lewat hubungan dan diciptakan dalam hubungan yang menunjangnya. Kekuasaan selalu beroperasi melalui konstruksi berbagai pengetahuan. Melalui wacana, hubungan antara kekuasaan di satu sisi dengan pengetahuan di sisi lain terjadi. Foucault mengatakan, bahwa hubungan antara simbol dan yang disimbolkan itu bukan hanya referensial, melainkan juga produktif dan kreatif. Simbol yang dihasilkan wacana itu, antara lain melalui

bahasa, moralitas, hukum, dan lainnya, yang tidak hanya mengacu pada sesuatu, melainkan turut menghasilkan perilaku, nilai-nilai dan ideologi.

Ideologi selalu mewarnai wacana, seperti yang dikatakan Aart van Zoest, bahwa teks tak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi. Maka dari itu, ideologi adalah topik yang paling penting dalam analisis wacana kritis. Tidak ada wacana yang benar-benar netral atau bersih dari kepentingan ideologi pembuatnya. Ideologi dapat diartikan sebagai sistem ide-ide yang diungkapkan dalam komunikasi atau terkadang hanya dipahami sebagai sebuah pemikiran saja.

Jika kita menilik kembali pembahasan wacana Foucault, dari definisi yang diberikan Foucault, terungkap bahwa wacana adalah alat bagi kepentingan kekuasaan, hegemoni, dominasi budaya dan ilmu pengetahuan. Distribusi wacana ketengah masyarakat pada era *post-modern* ini, dilaksanakan secara strategis melalui media, baik itu media cetak maupun elektronik.

Analisis gender berkembang seiring semakin semaraknya gerakan perempuan atau feminisme. Secara umum dapat dikatakan bahwa kajian perempuan atau analisis gender mencoba mengangkat perempuan setara dengan laki-laki. Kesetaraan tersebut terlihat dari keadilan dan kesetaraan gender secara struktural dan *cultural*. Penelitian yang mengangkat mengenai pemberitaan perempuan di media *online* ini menggunakan paradigma kritis. Ahmad Zaini Akbar (dalam Bungin, 2003:154-155) menyebutkan ciri-ciri mengenai analisis kritis:

Pertama, aliran kritis lebih menekankan pada unsur-unsur filosofis komunikasi. Pertanyaan-pertanyaan yang sering

dikemukakan oleh kaum kritis adalah, siapa yang mengontrol arus informasi? Siapa yang diuntungkan oleh arus dan struktur komunikasi yang ada? Ideologi apa di balik media?

Kedua, aliran kritis melihat struktur sosial sebagai konteks yang sangat menentukan realitas, proses, dan dinamika komunikasi manusia, khususnya (termasuk komunikasi massa).

Ketiga, aliran kritis lebih memusatkan perhatiannya pada siapa yang mengendalikan komunikasi. Aliran ini beranggapan bahwa komunikasi hanya dimanfaatkan oleh kelas yang berkuasa, baik untuk mempertahankan kekuasaannya maupun untuk merepresi pihak-pihak yang menentangnya.

Keempat, aliran kritis sangat yakin dengan anggapan bahwa teori komunikasi manusia, khususnya teori-teori komunikasi massa, tidak mungkin dapat menjelaskan realitas secara utuh dan kritis apabila ia mengabaikan teori-teori masyarakat. Oleh karena itu, teori komunikasi massa haruslah selalu berdampingan dengan teori-teori sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis memahami bahwa pandangan kritis melihat komunikasi bukanlah suatu bentuk realitas yang netral dan berdiri sendiri, melainkan memiliki makna tertentu tergantung muatan ideologi yang akan dimasukkan ke dalam isi komunikasi tersebut. Eriyanto (2002:23), “Analisis wacana kritis digunakan karena menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna.”

Mengutip Fairclough (dalam Eriyanto, 2005:286), wacana merujuk kepada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial, lebih daripada aktivitas individu atau untuk merefleksikan sesuatu. Memandang bahasa sebagai praktik sosial semacam ini, mengandung sejumlah implikasi :

Pertama, wacana adalah bentuk dari tindakan seseorang menggunakan bahasa sebagai suatu tindakan pada dunia dan khususnya sebagai bentuk representasi ketika melihat dunia/realitas. Pandangan semacam ini tentu saja menolak pandangan bahasa sebagai *term* individu.

Kedua, model mengimplikasikan adanya hubungan timbal balik antara wacana dan struktur sosial. Di sini wacana terbagi oleh struktur sosial, kelas, dan relasi sosial lain yang dihubungkan dengan

relasi spesifik dan institusi tertentu seperti pada hukum atau pendidikan, sistem, dan klasifikasi.

Teun Van Dijk (1998) (dalam Darma: 2009) mengemukakan bahwa, “AWK digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis, diantaranya politik, ras, gender, kelas sosial, hegemoni, dan lain-lain. Seperti yang dikatakan Van Dijk, analisis Norman Fairclough didasarkan pada pertanyaan besar, bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Fairclough berusaha membangun suatu model analisis wacana yang mempunyai kontribusi dalam analisis sosial dan budaya, sehingga ia mengkombinasikan tradisi analisis tekstual yang selalu melihat bahwa dalam ruang tertutup dengan konteks masyarakat yang lebih luas.

Titik perhatian Fairclough (dalam Darma: 2009) adalah bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologi tertentu. Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi yang mengaitkan makro struktur (*sociocultural practice*), meso struktur (*discourse practice*) dan mikro struktur (*text*), melalui sebuah teknik yang disebut analisis intertekstual. Analisis intertekstual terhadap teks terfokus pada garis batas antara teks dan praktis wacana dalam kerangka kerja analitik. Intertekstual analitik memiliki tiga tugas, yaitu: Pertama, berupaya melihat praktik wacana dari perspektif praktik wacana. Kedua, melihat jejak atau melacak praktik wacana dalam teks, dan Ketiga, bertujuan membongkar berbagai macam wacana yang diartikulasikan secara bersamaan didalam teks dan sifatnya lebih interpretif yang meletakkan teks dalam hubungannya dengan *repertoire* sosial praktik wacana. Sehingga konsekuensi penganalisaan atas interkontekstual bergantung pada pemahaman yang luas terhadap sosial budaya. Ada tiga aspek

yang menjadi fokus dalam melakukan analisis intertekstual bila dikaji secara operasionalisasinya, yaitu: 1) analisis “representasi wacana”, bagaimana ucapan dan tulisan lainnya bersatu dengan teks media, 2) analisis umum dari tipe wacana, dan 3) analisis naratif terhadap (konfigurasi) wacana dalam teks.

Fungsi sebuah teks ini tidak akan terjadi jika tidak ada pembacanya yang menyambut, menafsir, dan memberi makna. Sebuah teks akan makna bukan karena mempunyai struktur tertentu suatu kerangka yang menentukan dan mendukung bentuk tetapi juga karena teks tersebut berhubungan dengan teks lain.

Sebuah teks lahir dari teks-teks lain dan harus dilihat sesuai dengan tempatnya dalam kawasan tekstual. Sehingga intertekstual berfungsi di sini. Secara umum intertekstual dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu: *manifest intertekstual* dan *interdiscursivity*. *Manifest intertekstual* adalah bentuk intertekstualitas dimana teks yang lain atau suara lain itu muncul secara eksplisit dalam teks. Dalam *manifest intertekstual*, teks lain hadir secara eksplisit dalam teks misalnya dalam bentuk kutipan. Sedangkan pada *interdiscursivity*, teks-teks lain tersebut mendasari konfigurasi elemen yang berbeda dari ketentuan wacana (*order of discourse*). Pada manifest intertekstual, teks-teks lain itu dapat diamati dan terwujud dalam teks, maka *interdiscursivity*-nya terlihat ditingkat *societal*, institusional juga personal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun analisis wacana dalam bentuk analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) berarti peneliti menganalisis wacana pada level naskah beserta sejarah dan konteks wacana tersebut. Penelaahan atas wacana tidak hanya dilakukan pada level naskah namun dilanjutkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi naskah. Dalam pandangan kaum kritis, analisis wacana kritis memiliki karakteristik sebagai berikut:

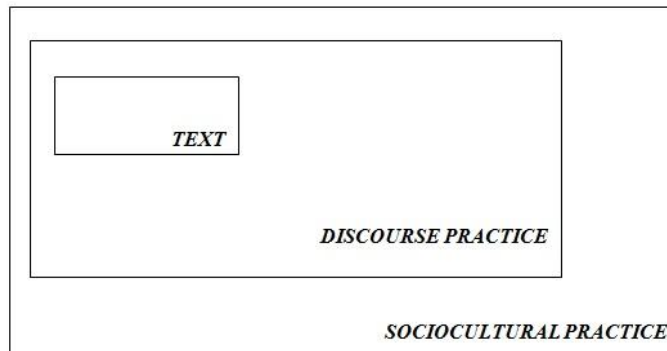
1. Tindakan, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Maka dari itu wacana diasosiasikan sebagai bentuk interaksi. Perusahaan yang menawarkan produk dan para kreatornya tentu memiliki tujuan untuk mengadakan interaksi kepada khalayak. Oleh karena itu wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, dan diekspresikan secara sadar dan terkontrol.
2. Konteks, analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar, peristiwa dan kondisi. Wacana dipandang, diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu.
3. Historis, menempatkan wacana dalam konteks tertentu berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek yang penting untuk bisa dimengerti, teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu.

4. Kekuasaan, analisis wacana kritis mempertimbangkan elemen kekuasaan dalam analisisnya. Setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang ilmiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan wacana.
5. Ideologi, merupakan konsep sentral dalam analisis wacana kritis, karena seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa ideologi selalu mewarnai produksi wacana. Teks, percakapan dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideology atau pencerminan dari ideologi tertentu.

Menurut Fairclough dan Wodak (1997) (dalam Darma, 2009:51) disebutkan bahwa analisis wacana kritis melihat pemakaian bahasa baik tuturan maupun tulisan yang merupakan bentuk dari praktik sosial. Menggunakan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa deskriptif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi. Wacana ini bisa memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara kelas sosial, laki-laki dan perempuan, kelompok mayoritas dan minoritas melalui perbedaan representasi dalam posisi sosial yang ditampilkan.

Bahasa mampu mengantarkan pembaca untuk memahami tingkat pengetahuan dan pemahaman tertentu, termasuk di dalamnya siapa yang berkuasa dalam penggunaan bahasa tersebut dan ideologi yang dimasukkan ke dalam bahasanya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Berikut penjelasan Fairclough mengenai model yang dibuatnya :

Bagan 1.1 Model Critical Discourse Analysis Norman Fairclough



Sumber : Media Discourse (Fairclough, 1995:59).

Dari Bagan 1.1 di atas menggambarkan tentang ketiga dimensi yang saling berhubungan dalam satu bingkai. Dalam dimensi teks merupakan tatanan deskripsi mengenai bahasa dan wacana. Dalam dimensi tersebut memberikan pengertian bahwa *text* meliputi apa yang dikatakan secara langsung maupun secara tidak langsung seperti melalui bahasa tubuh. Selain itu *text* di sini merupakan apa yang dituliskan, seperti kosakata yang digunakan oleh narator, tata bahasa dalam kalimat, hubungan antar kalimat, dan struktur teks. (Fairclough, 1992:75). Di sini peneliti melihat bagaimana teks tentang pemberitaan politisi perempuan dinarasikan melalui tata bahasa, struktur teks yang ada di Detikcom.

Dalam kolom selanjutnya yakni mengenai dimensi *discourse practice* memberikan pengertian bahwa teks yang telah dibuat dipengaruhi oleh produksi dan konsumsi teks. Produksi teks menyangkut darimana dan bagaimana teks tersebut diproduksi oleh institusi yang membuat teks tersebut. Melihat rutinitas dalam institusi tersebut, seperti proses awal hingga akhir hingga teks tersebut mencapai garis akhir. Selain itu juga melihat siapa saja pembuat teks tersebut. Dalam tatanan konsumsi teks, melihat segmentasi dan targeting dari institusi tersebut. Pada bagian ini dilihat siapa Detikcom itu, bagaimana ideologi serta

kepentingan CT Corp sebagai korporasi media yang menaungi Detikcom, dan siapa *audience* dari Detikcom.

Sociocultural adalah hal yang terpenting dalam analisis wacana kritis. *Text* yang sebelumnya sudah dibuat dan dianalisis, kemudian dihubungkan dengan kultur sosial yang sedang terjadi. Melihat bahwa sesungguhnya media bekerja untuk mengkonstruksi apa yang terjadi pada peristiwa atau realitas, namun kultur sosial yang sudah ada pada masyarakat luas-lah yang sebenarnya sudah membentuk konstruksi tersebut. Media merupakan cerminan dari kultur sosial yang sudah berkembang (Fairclough, 1995:51). *Sociocultural* di Indonesia mengenai budaya patriarki sangat kental, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam pemenuhan hak dari laki-laki dan perempuan, termasuk dalam dunia politik, politisi perempuan dinilai kurang berkualifikasi untuk terjun dalam dunia politik. Pada akhirnya pemberitaan di media cenderung mengkomodifikasikan politisi perempuan sebagai objek politik, kemunculannya di pemberitaan hanya berdasarkan *stereotype* yang ada dalam kultur sosial masyarakat kita.

Supaya analisis wacana kritis semakin tajam, maka diperlukan analisis mengenai hubungan dengan luar teks yang meliputi dua hal, yakni menganalisa hubungan dengan unsur lain atau peristiwa yang lain dan yang kedua yakni hubungan antar teks dengan teks yang lain yang disebut dengan intertekstualitas. Intertekstualitas tampak dalam dua bentuk yakni kehadiran unsur-unsur dari teks lain dalam suatu teks yang berupa kutipan, laporan, tulisan, ataupun pemikiran. Teks selalu memiliki asumsi, yakni merupakan latar belakang dari apa yang

dikatakan namun dianggap ada. Seperti intertekstualitas, asumsi menghubungkan satu teks dengan teks yang lainnya, hanya saja asumsi tidak langsung dikaitkan dengan teks tertentu. Intertekstualitas dan asumsi mengandaikan sejarah teks dan pemaknaan. Maka, intertekstualitas dan asumsi semakin mempertajam analisis karena bukan hanya pemaknaan harafiah namun juga membantu membongkar ideologi atau kepentingan yang sudah dibekukan oleh bahasa.

2. Objek Penelitian

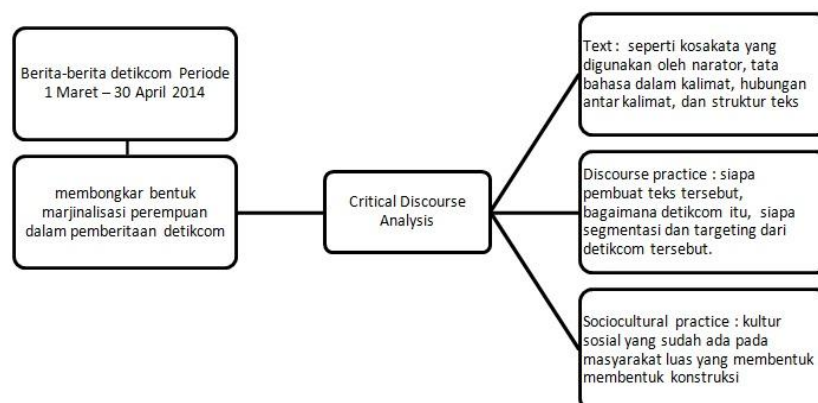
Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah pemberitaan mengenai politisi perempuan di media Detikcom selama masa kampanye pemilu 2014 yaitu bulan April dan Maret tahun 2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian sumber data yang menjadi acuan penulis terdiri dari dua macam. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data dokumen. Selanjutnya, peneliti akan mengamati dokumen (berupa berita-berita) yang menjadi obyek penelitian. Sumber data kedua adalah data sekunder, keberadaan data sekunder ini dimaksudkan untuk mendukung sumber data utama. Data sekunder yang menjadi acuan penulis adalah buku-buku, internet, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu maupun referensi-referensi lain yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat. Adapun teknik pengambilan sampel berdasar pemberitaan yang memuat bentuk marjinalisasi terhadap politisi perempuan, dimana sampel diperoleh dari situ.

Murniati (2004:xx) dalam bukunya *Getar Gender* menjelaskan bahwa marjinalisasi berarti menempatkan atau menggeser ke pinggiran. Perempuan dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani, sehingga tidak pantas atau tidak dapat memimpin. Akibatnya perempuan selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan untuk memimpin. Marjinalisasi merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan. Namun, hak tersebut diabaikan dengan berbagai alasan demi suatu tujuan. Menurut Fakhri (2008:14), proses marjinalisasi sama saja dengan proses pemiskinan. Hal ini dikarenakan tidak diberinya kesempatan kepada pihak yang termarginalkan untuk mengembangkan dirinya. Demikian juga yang dialami oleh perempuan saat proses marjinalisasi ini terjadi pada jenis kelamin. Perempuan merupakan pihak yang dirugikan daripada laki-laki dalam hal ketidakadilan gender ini. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil 9 berita dalam portal berita *online* Detikcom periode 1 Maret 2014-30 April 2014, yang mana pada periode tersebut merupakan masa-masa kampanye parpol yang ikut serta dalam Pemilu 2014.

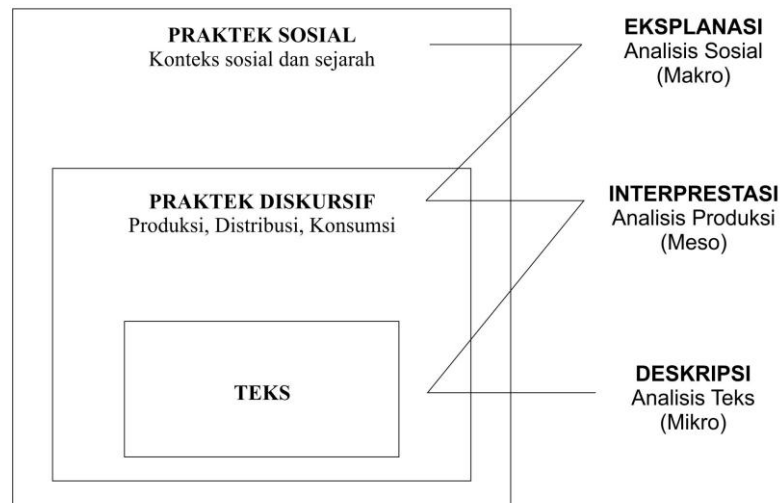
Bagan 1.2 Kerangka Berpikir



Sumber : Penulis

4. Teknik Analisis Data

Bagan 1.3 Teknik Analisis Data Norman Fairclough



*Sumber : Critical Discourse Analysis,
The Critical Study Of Language, Fairclough (1995)*

Teknik analisis data merupakan cara untuk mencari dan menyusun secara sistematis hasil dari observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data merupakan proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan data sehingga ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut (Moeloeng dalam Semma, 2008: 249). Analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui penjelasan secara logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat dijawab.

Dalam penelitian "Wacana Politisi Perempuan Dalam Media : Upaya Marjinalisasi Politisi Perempuan Oleh Media", analisis data menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough dengan menggunakan tiga dimensi wacana yang saling berhubungan dalam satu bingkai seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Tahap deskripsi, deskripsi teks dalam pemberitaan mengenai politisi perempuan dilakukan dengan cara menganalisis pemberitaan berdasarkan kosakata, gramatika, struktur tekstual. Meneliti melalui narasi teks maka akan melihat dari kosakata yang digunakan oleh narator, tata bahasa dalam kalimat, hubungan antar kalimat, dan struktur teks untuk mengungkap gagasan yang ada di dalamnya.

Tahap interpretasi, tahapan ketika sebuah teks ditampilkan dalam sebuah media maka akan terlihat tujuan mengapa teks tersebut dipilih untuk ditampilkan. Begitu juga dengan teks-teks yang muncul secara bersamaan di dalam sebuah berita akan berelasi dengan wacana tertentu yang ingin dihadirkan atau disebut intertekstualitas. Intertekstualitas adalah proses yang ingin melihat hubungan teks dengan konteks social yang menyebabkan teks tersebut hadir. Tahapan ini adalah penghubung dalam menafsirkan teks yang dihubungkan dengan praktik wacana.

Tahap eksplanasi, eksplanasi dilakukan dengan cara memberi penjelasan pada sesuatu yang telah ditafsirkan. Tahapan ini adalah penghubung dalam menafsirkan teks yang dihubungkan dengan aspek sosial. Tahapan ini mengkaji struktur hubungan antarkuasa sebagai proses sosial. Konteks sosial dalam analisis wacana kritis dipandang menyebabkan hubungan antara peristiwa diskursif tertentu dan situasi, institusi, dan struktur sosial.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan penyajian dari hasil analisis data dan memudahkan proses analisis penelitian. Untuk itu, tulisan ini akan disusun secara sistematis yang terdiri dari empat bab.

Bab pertama yang berisi latar belakang masalah, ruusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan metodologi penelitian. Bab ini disajikan sebagai sebuah pendahuluan dan pengantar isi dari pembahasan penelitian pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian. Bab ini berisi profil serta deskripsi Detikcom sebagai objek penelitian yang akan menggambarkan gambaran mengenai objek penelitian dan memberikan informasi yang mendukung tentang objek penelitian.

Bab ketiga berisi tentang hasil analisis penelitian.

Bab keempat akan berisi tentang kesimpulan penelitian dan juga saran untuk penelitian kedepannya